

MENJELANG SEABAD NU: DI TENGAH NEOLIBERALISME MASYARAKAT NAHDLIYIN MAU KE MANA?

NUR KHALIK RIDWAN

Abstrak

Kendati masa akar rumput NU, yang mayoritas dari kelompok ekonomi lemah, adalah pihak yang paling rentan imbas globalisasi neoliberalisme, namun kiprah NU selama ini belum menunjukkan upaya berarti untuk membendung arus besar tersebut. Tidak munculnya NU sebagai garda depan advokasi saat disahkannya Undang-Undang Sumber daya Air 2007—yang substansinya privatisasi air—merupakan blunder sebab massa NU mayoritas adalah petani. Sebaliknya, justru ada gejala makin terserapnya sumber daya NU—utamanya kiai dan kaum muda—ke “proyek demokratisasi” yang tidak menyentuh akar persoalan. Agar tidak terus terhimpit, strategi perlawanan NU harus membangun posisi di tiga level bekerjanya globalisasi dan neoliberalisme: level dunia internasional, level nasional negara, dan level basis riil di masyarakat.

A. Sindrom-Sindrom Kekalahan

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 dalam sebuah rapat di Surabaya, yang menurut KH. Saifuddin Zuhri,¹ dihadiri oleh KH. Hasyim Asy’ari, KH. Bisyrri, KH. Ridwan, KH. Nawawi, KH. Doromuntaha (menantu KH. Cholil Bangkalan), dan banyak kiai lain. Kini NU hampir memasuki usia seabad (sekarang berumur 81 tahun), sebuah usia yang cukup panjang untuk sebuah organisasi masyarakat, bahkan lebih panjang dari usia kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

Di tengah usia yang menjelang seabad ini, NU menghadapi problem-problem yang jauh lebih kompleks. Saat kelahirannya dulu, NU menghadapi dua hal:

1 KH. Saifuddin Zuhri, *Kiai Haji Abdul Wahab Khasbullah: Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Pustaka Falakhiyyah, 198), hlm. 29; dan H. Aboe Bakar, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar* (Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. KH.A. Wahid Hasjim, 1957), hlm. 471.

Nur Khalik Ridwan, pernah nyantri di PP Darunnajah Banyuwangi dan menulis beberapa buku yang di antaranya “Demoralisasi Khittah NU dan Pembaruan”; dan ikut dalam beberapa forum gerakan muda Nahdliyin.

globalisasi wahhabi dan globalisasi imperialisme fisik Barat ke negara-negara dunia ketiga, termasuk di nusantara. Kini NU juga menghadapi dua tantangan sekaligus: globalisasi Islam radikal dan globalisasi neoliberal.² Keduanya akan menggerus nasib NU ke depan, bahkan bisa menghempaskan NU menjadi butiran-butiran pasir yang berceceran bila tidak direspon secara baik.

Tulisan ini ingin menempatkan NU dalam konteks tantangan neoliberal yang sedang melanda dunia, dan bahkan di nusantara. Respon NU atas neoliberalisme akan menentukan apakah seluruh pilar-pilar pendukung NU—masyarakat basis NU, elit-elit kaum muda NU dan elit ulama-kiai NU—akan bisa menatap masa depan dengan baik atautkah akan menjadikan mereka terjerembab dan terbelit dalam sarung yang mereka pakai, dan mengalami kekalahan.

Dalam sejarahnya NU sendiri banyak mengalami sindrom kekalahan: Nahdlatutujjar lahir sebelum NU berdiri (1918), diharapkan mampu mengangkat ekonomi pertanian masyarakat pesantren dan pedesaan,³ tetapi berakhir dengan kekalahan dan mati; NU sendiri lahir, karena kecewa dengan kalangan modernis akibat ditinggalkan dalam kongres-kongres al-Islam,⁴ dan di sini ada kekalahan-kekalahan inisiatif; kehadiran NU dibanggakan pada saat-saat genting keadaan mengancam NKRI dan negara Pancasila dari blok negara Islam, dan NU tampil ke depan dan memberi argumentasi pentingnya Islam dan umat Islam mendukung Pancasila, tetapi setelah itu, NU tetap berada dalam posisi yang pinggir, baik dalam ekonomi ataupun kekuatan penentu kebijakan; dan ketika peristiwa 65, masyarakat NU tampil terdepan di lapangan, bahkan ketika itu banyak masyarakat NU yang seakan menjadi pahlawan, tetapi setelah itu NU dikandangkan kembali ke desa dan di perkampungan-perkampungan kumuh dengan derajat pembunuhan massal di lapangan secara besar.⁵

Masih banyak lagi kekalahan-kekalahan sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak sebanding dengan retorika para elitnya bahwa NU adalah organisasi besar bermassa paling besar di Indonesia.⁶ Kekalahan-kekalahan ini karena NU selalu

2 Penulis sedang menyiapkan naskah buku tentang NU dan hubungannya dengan neoliberal yang juga berangkat dari dua tantangan, globalisasi Islam radikal dan globalisasi neoliberal. Sedangkan tulisan ini sebagiannya juga naskah yang dipersiapkan itu dengan ditambah di sana-sini dalam konteks tantangan neoliberal.

3 Lihat, Jarkom Fatwa, *Sekilas Nahdlatut Tujjar* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

4 Lihat, Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1998), bagian “Reaksi Kalangan Tradisi dan Kalangan Kebangsaan”, terutama hlm. 241 dan seterusnya.

5 Jumlah-jumlah korban tahun 65 bisa dilihat dalam, Robert Cribb (ed.), *The Indonesians Killing: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* (Yogyakarta: Mata Bangsa-Syarikat, 2004).

6 Jumlah massa NU selalu dikemukakan oleh elit-elit NU dengan memperkirakan sekitar 40 juta. Lihat data 40 juta ini dalam “Tentang NU: Basis Pendukung” dalam NU Online. Tetapi data-data resmi yang bukan perkiraan selalu tidak pernah ada, karena tidak pernah diadakan sensus warga NU oleh PBNU, bahkan tidak ada KTNU yang menyeluruh. Yang ada adalah klaim bahwa mereka yang menerapkan praktik-praktik ritual ala pesantren adalah warga NU. Padahal penandaan ini akan semakin sulit dipertahankan di zaman sekarang ini. Kalau ada data resmi yang valid, sangat mungkin jumlah massa NU akan semakin surut, karena adanya invasi PKS dan HTI, di samping animo untuk menjadi warga NU juga semakin menjadi pertanyaan tersendiri.

melakukan tindakan sosial yang reaktif, tidak mendesainnya untuk 10, 20, atau 50 tahun mendatang, di mana NU hanya bertindak pasif; dan walaupun ada tindakan-tindakan kreatif, tetapi terbentur oleh hunjaman-hunjaman “mental” dan badai kekuasaan yang kuat, dan cara bertahan NU adalah lari ke pinggir.

Dalam hal ini, melihat kemungkinan yang tepat agar NU merespon neoliberalisme yang menjadi tren kini bisa diajukan beberapa pertanyaan: Bagaimana konsekuensi-konsekuensi neoliberalisme bagi masyarakat NU? Bagaimana masyarakat NU pada hari ini menempatkan posisinya di tengah gelombang besar neoliberalisme? Adakah modal sosial di dalam NU untuk merespon neoliberalisme itu dan apa hambatan-hambatannya? Adakah kemungkinan-kemungkinan NU bisa melakukan sesuatu untuk merancang desain NU menjelang usianya yang seabad agar tidak mengalami nasib tragis dengan penuh kekalahan?

B. Data-Data: Imperialisme Neoliberal Mencengkeram Bumi Nusantara

Tentang neoliberalisme sudah banyak buku-buku yang menteorisasikannya,⁷ dan karenanya tidak perlu diuraikan secara panjang. Secara prinsip neoliberal bermakna faham atau madzhab ekonomi yang memperjuangkan *laissez faire* (persaingan bebas) dalam hak-hak kepemilikan oleh individu. Globalisasi neoliberal berarti “pengintegrasian ekonomi bangsa-bangsa ke dalam suatu ekonomi global”⁸ pasar bebas yang berimbas pada nilai-tatanan sosial, agama, budaya, politik, dan lain-lain. Faham ini dipopulerkan oleh Friederich von Hayek dan Milton Friedman, dua orang peraih nobel ekonomi, dan mahaguru neoliberal. Pilar-pilar faham ini adalah negara-negara maju, perusahaan-perusahaan transnasional, dan tiga badan dunia penting: IMF, WTO, dan Bank Dunia.

Faham neoliberal ini muncul pasca 1970-an dan hingga hari ini mulai dipercaya oleh para pebisnis transnasional dan negara-negara maju untuk menjadi pilar menjalankan negara. Keyakinan mendasar dari faham neoliberal adalah: biarkan pasar bebas bekerja, jangan dibatasi oleh negara; kurangi pemborosan dengan memangkas subsidi terhadap pelayanan publik; harus ada deregulasi ekonomi, yaitu semua aturan negara yang mengekang kebebasan berusaha, dan segala proteksi aturan untuk membela kelompok rentan perlu dihapuskan; perlu dilakukan

7 Di antara buku-buku yang membahas neoliberal, di antaranya bisa dirujuk: yang berbahasa Inggris dan belum diterjemah di antaranya Eric Toussaint, *Your Money or Your Life: The Tyranny of Global Finance* (Pluto Press, 1999), Walden Bello, Nicola Bullard, Kamal Malhotra (ed.), *Global Finance: New Thinking on Regulating Speculative Capital Markets*, (Zed Books, 2000), dan lain-lain. Yang beredar di Indonesia di antaranya sudah diterjemah ditulis William K. Tabb, *Tabir Politik Globalisasi*, (Yogyakarta: Lafadh Pustaka, 2003); Marthin Khor, *Globalisasi dan Perangka Negara-negara Selatan* (Yogyakarta: Cindelar, 2000); Mansour Fakh, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist-Pustaka Pelajar, 2002), dan banyak lagi. Sedangkan lembaga-lembaga yang konsen dengan isu globalisasi di Indonesia di antaranya Institute for Global Justice (IGJ), Cindelar, INFID, dan lain-lain.

8 Mansour Fakh, *Runtuhnya Teori Pembangunan ...*, hlm. 211.

privatisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan menyerahkan itu kepada swasta/investor asing atau dalam negeri; dan tidak boleh ada barang-barang yang dimiliki publik untuk mendukung hidup mereka, karena itu tidak sesuai dengan pasar bebas, dan menyerahkan tanggungjawab kehidupan publik kepada masing-masing individu.⁹

Di Indonesia, faham ini sebenarnya mulai dirintis sejak Soeharto berkuasa. Soeharto memakai sahabat-sahabat Amerika untuk meletakkan dasar-dasar ekonominya, yang oleh David Ransom disebut para “Mafia Berkeley”,¹⁰ karena kebanyakan mereka lulusan Universitas Berkeley dan beberapa universitas Amerika Serikat. Sahabat-sahabat Amerika yang disebut David Ransom ada di bawah patron Sumitro Djojohadikusumo, dekan ekonomi UI di masa awal dan yang mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya ke Berkeley dan sekitarnya. Sumitro ini yang kemudian diangkat Soeharto sebagai menteri perdagangan dan murid-muridnya mengawal ekonomi Indonesai masa Soeharto.

Dasar-dasar neoliberalisme yang diletakkan Soeharto lewat tangan-tangan, yang oleh Davis Ransom disebut “Mafia Berkeley” ini, bisa disebutkan dalam dua hal: mendatangkan Hutang Luar Negeri (HLN) dan mempercayai investasi asing sebagai basis pembangunan dengan cara membuka luas modal asing. Lewat HLN ini, Indonesia digantungkan nasibnya kepada negara-negar maju, tetapi kemudian ini menjadi blunder karena memanjakan pejabat dan elit untuk mencari alternatif-alternatif kreatif, dan menyerahkan nasib bangsa ke negara-negara maju. Yang lebih parah lagi HLN menjadi keniscayaan hingga pada rezim berkuasa di era reformasi yang kemudian mendatangkan IMF, dan jumlah HLN Indonesia jauh melampaui kemampuan Indonesia untuk membayarnya.

Di bawah ini bisa dilihat tabel HLN Indonesia pada masa Soeharto dan posisi di era reformasi sampai tahun 2005:¹¹

TABEL 1: Jumlah HLN masa Soeharto tahun 1989-1997

Tahun	Komitmen HLN	HLN yang Dicairkan
Sebelum 1989	122,547,144	68,231,996

- 9 Bonni Setiawan, Neoliberal dan Kejahatan Multilateral. Sebuah makalah yang dimuat dalam situs IGJ, www.globaljust.org.
- 10 David Ransom, *Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia* (Jakarta: Koalisi Anti Utang, 2006). Buku ini bermula ketika “Ramparts” menugaskan David Ransom untuk menyelidiki isu tentang “Mafia Berkeley” dan peranannya dalam pembunuhan massal di Indonesia pada tahun 1965. Penyelidikan itu kemudian dipublikasikan dan dimuat dalam majalah “Ramparts”, sebuah terbitan berkala di Amerika pada bulan Oktober 1970.
- 11 Data-data hutang ini didasarkan pada statistik yang dibuat oleh Kusfiardi, Koordinator Nasional Koalisi Anti Utang. Lihat, Kusfiardi, *Statistik Utang Luar Negeri Pemerintah* (Jakarta: KAU, t.t.). Situs Kantor Perbendaharaan Negara (www.perbendaharaan.co.id) juga memiliki data statistik Hutang Luar Negeri (HLN) Indonesia, tetapi ketika dibuka bagian statistik HLN ini selalu error.

1989	12,512,300	6,674,924
1990	10,748,406	4,437,649
1991	11,508,084	6,418,417
1992	15,652.13	6,631,957
1993	22,631,35	6,275,948
1994	15,732,03	6,093,997
1995	18,184,67	5,796,205
1996	20,621,77	6,003,554
1997	7,802,787	4,501,393

Sumber: Diolah dari Kusfiardi, KAU, t.t.: 5-6.

TABEL 2: *Jumlah HLN sampai 2005 dengan estimasi kurs 9000 US dollar*

Kategori	Dalam US miliar dollar	Dalam RP (triliun)	Dalam persen (%)
Komitmen HLN yang disetujui	365.88	3,292.95	100%
Jumlah HLN yang dicairkan	162.13	1,459.17	44% dari komitmen
Jumlah yang belum dicairkan	203.75	1,833.78	56% dari komitmen
Jumlah HLN yang sudah dibayar	100.31	902.83	62% dari HLN yang dicairkan
Jumlah HLN yang belum dibayar (outstanding)	61.82	556.34	38% dari HLN yang dicairkan
Jumlah fee yang harus dibayarkan	203.75 (HLN yang belum cair)	1,833.78 (HLN yang belum cair)	1 % dari HLN yang belum cair = 1,833 trilyun

Sumber: Diolah dari Kusfiardi, KAU, t.t.

Dalam tabel di atas sampai tahun 2005 posisi HLN Indonesia yang harus dibayar berjumlah 556.34 triliun. Kalau ditotal seluruhnya dan dibandingkan dengan APBN tahun 2006 yang dianggarkan Rp. 652.237.026.162,¹² atau RAPBN tahun 2008 Rp 761,4 triliun,¹³ maka jumlah HLN Indonesia akan memakan habis pendapatan negara. Penulis belum menemukan data sampai tahun 2007 ini berapa total HLN Indonesia, yang tentunya jauh lebih besar dari 2005. Sementara rencana berutang kembali, telah dikemukakan jauh hari oleh para menteri perekonomian Indonesia. Pada pertengahan Desember 2006, pemerintah merencanakan untuk kembali berutang dalam jumlah besar. Pada periode 2006-2009, pemerintah mengusulkan untuk menambah utang sebesar 30-35 miliar dolar AS. Bahkan, dalam pemberitaan terakhir angkanya sudah mencapai 40 miliar dolar AS.¹⁴ Pembubaran CGI hanya naga-naganya untuk mengalihkan kelompok kreditor multilateral ke negosiasi hutang negara pernegara, bukan menghapus hutang sama sekali.

Skema HLN memberikan ruang yang besar ketergantungan Indonesia pada negara-negara maju. Apalagi setiap HLN dicairkan kurang lebih separonya selalu berbentuk proyek yang keuntungannya juga kembali kepada negara-negara maju; dan setiap jumlah besaran komitmen HLN tidak semua bisa dicairkan, padahal setiap total komitmen HLN selalu harus membayar fee, sebesar 1 persen dan itu kembali ke negara-negara maju juga.¹⁵ Dengan skema ketergantungan HLN ini, kemajuan-kemajuan ekonomi Indonesia yang diretorikakan oleh elit politik kita adalah omong kosong, karena beban hutang Indonesia jauh lebih besar dari pendapatannya. HLN ini yang membuat Indonesia tidak mandiri, tidak merdeka dan semakin mudah menerima skema neoliberal dan didikte asing.

Ketergantungan Indonesia dengan negara-negara maju dan adopsi-adopsinya lewat kebijakan IMF yang diundang Indonesia dengan vulgar setelah krisis moneter 1998 dalam bentuk privatisasi BUMN, pencabutan subsidi publik, dan sejenisnya, telah menaikkan secara drastis penguasaan asing terhadap ekonomi Indonesia. Adanya UU Penanaman Modal yang dilahirkan masa Orde Baru, yang menurut David Ransom dilakukan oleh para Mafia Berkeley, dan diperbarui secara lebih bebas pada masa SBY dengan disahkannya pada 29 Maret 2007, menjadi tonggak baru bagi penguasaan asing atas Indonesia: sejalan dengan prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dikenal sebagai perjanjian Trade-Related Investment Measures (TRIMs).¹⁶

12 "Realisasi APBN Tahun Anggaran 2006: Tanggal 1 Januari 2006 s.d 07 Agustus 2006". Dimuat dalam situs Kantor Perbendaharaan Negara www.perbendaharaan.co.id, bagian "download".

13 "Pidato Kenegaraan Presiden RI: RUU APBN 2008 berdasarkan 8 Prioritas", dalam <http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/08/16/2133.html>.

14 Lihat Tajuk Harian Media Indonesia, 1 Februari 2007.

15 Tentang penjelasan pembayaran fee dari komitmen HLN sebesar satu persen, lihat Kusfiardi, Statistik Utang Pemerintah ..., hlm. 41-42.

16 Untuk mengetahui dasar-dasar, model perjanjian, dan keyakinan dari perdagangan bebas yang dibawa WTO bisa dilihat dalam situs IGJ: www.globaljust.org, dalam bagian-bagian "Sekilas-Organisasi Perdagangan

Untuk menggambarkan bagaimana penguasaan asing dalam ekonomi Indonesia sangat besar, dan menjadi skema negara-negara maju, dapat dilihat konsesi-konsesi setelah Indonesia menandatangani HLN di masa awal berdirinya rezim Soeharto dan kondisi sekarang ini. David Ransom misalnya menyebutkan konsesi-konsesi yang segera dinikmati negara maju sangat jelas:¹⁷

- Freeport Sulphur membuka pertambangan di Irian Barat, yang hingga sekarang masih bertahan.
- International Nickel telah berhasil memperoleh tambang nikel di Sulawesi.
- Alcoa akan mengadakan perundingan untuk mendapatkan sebagian besar tambang bauksit di Indonesia.
- Weyerhaeuser, International Paper, Boise Cascade dan perusahaan-perusahaan kayu dari Jepang, Korea dan Filipina menebangi kayu di hutan-hutan rimba di Sumatra, Irian Barat, dan Kalimantan.
- Konsorsium dari pengusaha-pengusaha tambang raksasa dari Amerika Serikat dan Eropa, dengan dipimpin oleh US-Steel membuka pertambangan nikel di Irian Barat. Dua buah lagi lainnya yaitu US-British dan US-Australian, akan membuka pertambangan timah. Sedangkan US-New Zealander, berusaha untuk mendapatkan batubara.
- Di samping itu Jepang akan mengurus udang, ikan tuna, dan mutiara dari lautan kepulauan Indonesia.
- Hadiah yang terbesar yang sesungguhnya adalah minyak. Pada tahun 1969 terdapat 23 buah perusahaan minyak yang telah mengajukan permintaan untuk mendapatkan hasil eksplorasi, eksploitasi, dan menjual minyak yang terdapat di dasar Lautan Jawa dan di lain-lain perairan di pantai-pantai Indonesia. Dari jumlah tersebut, 19 di antaranya berasal dari Amerika. Natomas dan Atlantic-Ricfield mendapatkan konsesi minyak seluas 21.000 mil persegi (kira-kira 5.382.400 hektar), di sebelah timur pulau Jawa.

Kondisi pada sekarang ini tidak juga membaik di mana penguasaan asing semakin jauh mencengkrum bumi nusantara. Dalam bidang migas saja, sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dimiliki oleh perusahaan multinasional (asing). Perusahaan nasional hanya punya porsi sekitar 14,6 persen. Bahkan data terbaru di BP Migas menyebutkan, hanya ada sekitar 20 perusahaan migas nasional yang saat ini mengelola lapangan migas di Indonesia. "Dari 20 perusahaan tersebut, baru 10 perusahaan yang sudah

Dunia", "Sekilas-Perjanjian Pertanian WTO", "Pertanian yang Curang: Perjanjian Pertanian di WTO", dan lain-lain.

¹⁷ David Ransom, *Mafia Berkeley ...*, hlm. 68-69.

berproduksi. Sisanya, masih belum berproduksi.”¹⁸

Secara keseluruhan penguasaan asing ini dapat dilihat dalam penanaman modal di Indonesia dalam 10 tahun terakhir di bawah ini.

TABEL 4: Total PMDN dan PMA yang Disetujui Pemerintah Dalam 10 tahun terakhir

Tahun	PMDN dalam miliar rupiah	PMA dalam juta dollar Amerika Serikat
1996	100,499.4	29,776.4
1997	119,755.5	33,126.9
1998	60,748.5	13,556.5
1999	55,600.3	10,891.4
2000	88,294.7	15,279
2001	58,674	15,043.9
2002	25262.3	9,744.1
2003	48484.8	13,207.2
2004	36747.6	10,277.3
2005	50577.4	13,579.3
Total	644.644	164,482

Sumber: Lampiran I Kertas Posisi Kolaisi Sipil atas RUU PM.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil terhadap RUU Penanaman Modal (2007), jumlah modal asing pada level kurs Rp. 9000/US dollar nilainya dapat mencapai 1, 48 triliun rupiah (bandingkan dengan PMDN yang hanya RP. 644.644) atau mencapai 70 persen dari total modal yang ditanamkan dalam perekonomian Indonesia. Dominasi modal asing yang sedemikian besar berkontribusi terhadap buruknya fondasi ekonomi Indonesia. Apalagi jika terjadi krisis seperti yang terjadi pada tahun 1998, modal asing dapat bergerak begitu cepat keluar dari Indonesia, baik yang diinvestasikan langsung di berbagai sektor ekonomi yang ada, maupun

¹⁸ Ini adalah perkataan Kardaya Warnika, Kepala BP Migas, Sabtu (23/9/2006) yang dimuat Tribun, 24 September 2006 dengan judul “85 Persen Tambang Migas dikuasai Asing”. Pernyataan ini juga dikutip dalam Kertas Posisi Koalisi Masyarakat Sipil terhadap RUU Penanaman Modal (2007), dalam Lampiran I dengan judul “Modal Asing di Indonesia”.

yang bergerak di pasar.

Makna dari dua hal yang dibicarakan di atas (ketergantungan HLN Indonesia dan penguasaan asing atas ekonomi Indonesia) adalah adanya imperialisme non-konvensional yang sedang dialami bangsa Indonesia dan berbeda dari yang dulu, tetapi sama-sama tetap dilakukan negara-negara maju. HLN adalah cara bagaimana melanggengkan hegemoni negara maju kepada negara miskin¹⁹ seperti Indonesia di zaman sekarang ini. Pasar bebas dan keyakinan-keyakinan neoliberal yang telah disebutkan memiliki beberapa dalil di atas, bermuara pada penguasaan asing ini. Cara-cara privatisasi BUMN, deregulasi ekonomi, dan dalil-dalil lain pada dasarnya hanyalah memberikan tempat dominasi asing atas ekonomi Indonesia, sebetulnya dari imperialisme abad kini.

Secara lebih praktis keyakinan neoliberal ini justru berdampak buruk pada masyarakat: akumulasi kekayaan hanya terjadi di kalangan perusahaan-perusahaan asing, yang hingga 2005 telah mencapai 70 persen dari total modal di Indonesia; dan sisanya diakumulasi oleh gelintiran-gelintiran pengusaha Indonesia di mana 150 orang dan kelompok bisa mengakumulasi kekayaan dengan nilai Rp. 419, 4 triliun (46, 6 miliar US dollar). Tiga bos rokok memiliki kekayaan sebesar USD 10 miliar (Rp 90 triliun), 25 persen dari 150 orang terkaya di Indonesia.²⁰ Sementara sampai Maret 2007, ada tidak kurang dari 37,17 juta manusia Indonesia di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan satu bulan di bawah Rp. 166.000 sebagai ukuran di bawah garis kemiskinan.²¹

C. Konsekuensi Neoliberal bagi Masyarakat Basis NU

Di luar apa yang disebutkan di atas dalam bentuk ketergantungan terhadap negara maju dan penguasaan asing dalam ekonomi bangsa, untuk mengetahui bagaimana konsekuensi neoliberal bagi masyarakat NU, penting melihat poin-poin dampak neoliberal bagi masyarakat yang mengatasmakan kestabilan moneter, sebagaimana di bawah ini:²²

- Penghapusan subsidi gula, kedelai, tepung terigu, BBM, harga bahan-bahan

19 Imajinasi bahwa Indonesia sangat kaya, betul sejauh itu menyangkut kekayaan alam dan letak geografis yang strategis. Sebaliknya dalam kenyataan Indonesia bukanlah negeri yang makmur, karena Hutang Luar Negeri (HLN) Indonesia hamper setara dengan jumlah pendapatn Indonesia selama 5 tahun, di samping kekayaan-kekayaan alam kita dieksploitasi dengan kasar dan vulgar yang menghancurkan kekayaan ini.

20 Lihat laporan orang-orang terkaya di Indonesia ini dalam, Globe Asia, edisi Agustus 2007; lihat juga beberapa tulisan dalam wikipedia tentang "Daftar Milyarder" dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_milyarder; lihat laporan Suara Pembaruan, 31 Juli 2007 dalam judul "**Inilah 19 Orang Terkaya di Indonesia versi 'Globe Asia'; dan lihat laporan Jawa Pos, 31 Juli 2007 dalam laporan "Bos Rokok Terkaya Seluruh Indonesia"**.

21 BPS, Berita Resmi Statistik, No. 47/IX/1 September 2006 dalam judul "Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006"; dan BPS, Berita Resmi Statistik, No. 38/07/Th. X, 2 Juli 2007, dengan judul "Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2007".

22 Beberapa poin ini bisa ditemukan secara berserak dalam Revrisond Baswir, Deddy Heriyanto dan Rinto Andriyono, Terjajah di Negeri Sendiri (Jakarta: Elsam, 2003).

melonjak, masyarakat yang daya belinya tetap atau bahkan menurun akan sulit mengakses pangan, berpengaruh terhadap alokasi biaya pendidikan.

- Terjadi liberalisasi pendidikan dan menjadi komersial, sehingga biaya pendidikan mahal, tidak terjangkau masyarakat miskin; membanjirnya pendidikan asing dan terdesaknya pendidikan dalam negeri yang memang kurang bermutu, sehingga pendidikan masyarakat akan tergantung asing.
- Pengurangan tarif pertanian non-pangan, bahan kimia, dan lain-lain, menyebabkan membanjirnya barang dan produk-produk asing, dan terdesaknya produk lokal.
- Kemampuan untuk sekolah turun, sehingga terjadi 89.000 anak SD putus sekolah; akibatnya banyak sekolah yang gulung tikar karena anak-anak tidak mampu sekolah: 364 SD swasta di Jatim tutup, 10 SDN di Jakbar tutup, 20 SDN di DKI Jakarta digabung akibat kekurangan murid.
- Mahalnya biaya kesehatan dari mulai obat hingga akses berobat untuk orang miskin, dan masih banyak lagi.

Dalam posisi yang demikian, masyarakat NU perlu dilihat dalam tiga hierarki besar: masyarakat basis NU yang berasal dari desa dan berorientasi pertanian dengan segala jenisnya dan nelayan kecil; elit masyarakat NU yang terdiri dari ulama-kiai pesantren; dan elit kaum muda yang bisa dibaca sebagai elit tersendiri di dalam hierarki masyarakat NU, yang umumnya hidup di kota-kota besar setelah mereka melakukan urbanisasi dari desa dan tidak kembali lagi ke desa.²³

Kelompok masyarakat basis NU yang terdiri dari para petani (dan buruh tani) dan nelayan kecil akan mengalami dampak paling buruk dan laten dari neoliberalisme: pertama, dampak dari neoliberalisme akan dirasakan semua oleh masyarakat basis NU ini, yaitu sekolah formal mahal, berobat mahal, nelayan-nelayan kecil terancam karena BBM naik dan penguasaan pemodal besar di laut, dan yang paling parah terdesaknya produk lokal pertanian mereka diterjang perdagangan bebas; dan, kedua, dampak itu berakumulasi dengan problem akses atas tanah yang sangat kecil dan kemiskinan desa yang sudah lama akut.

Untuk sekadar menggambarkan bagaimana akses petani terhadap tanah, dapat dilihat misalnya penguasaan tanah oleh rumah tangga petani yang menurut sensus BPS tahun 1993 ada sebesar 19,71 juta hanya menguasai tanah seluas 17,4 juta hektar dengan struktur penguasaan tanah berdasarkan lahan seri B1: petani tuna kisma yang hanya memiliki tanah di bawah 0,10 % hektar berjumlah 28 %; petani yang memiliki tanah 0,10-0,49 hektar berjumlah 29 %; petani yang memiliki

23 Kajian tentang urbanisasi anak-anak muda pesantren ke kota dan menjadi segmen tersendiri di lingkungan Nahdliyyin bisa dilihat dalam, Nur Khalik Ridwan, Santri Baru: Pemetaan, Wacana Ideologi, dan Kritik (Yogyakarta: Gerigi Pustaka, 2004), bagian "Kelompok Santri Urban: Fenomena Santri Baru dari NU".

tanah 0,50-0,99 hektar berjumlah 15,7 %; petani yang memiliki tanah 1,00-5,00 hektar berjumlah 23 % dengan proporsi tanah yang dikuasai 53,8 %; dan petani yang memiliki tanah lebih dari 5 hektar berjumlah 2 % dengan proporsi tanah yang dikuasai 20,4 %.²⁴

Data ini menunjukkan bahwa petani yang jumlah rumah tangganya sebesar 19,71 juta (data tahun 1993) hanya menguasai 17,4 juta hektar. Padahal 19,7 juta rumah tangga ini kalau masing-masing rumah tangga memiliki 4 anggota keluarga, maka tinggal dikalikan dengan 4 menjadi berjumlah 78,8 juta jiwa. Di sini jelas ada ketimpangan dalam akses tanah. Bandingkan misalnya pada tahun 1999/2000 ada sejumlah 387 kelompok pengusaha menguasai 48,84 juta hektar.²⁵ Bahwa kemudian BPS mencatat hingga Maret 2007 ada jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 37,17 juta manusia, dan sebagian besar di desa, maka kebijakan neoliberal akan semakin memperparah kondisi petani-petani NU (dan petani secara umum), dan para nelayan kecil.

Dengan kebijakan neoliberal maka dalam pertanian tidak ada proteksi atau subsidi terhadap petani, penguasaan tanah dibebaskan justru kepada perusahaan-perusahaan transnasional dan besar, membanjirnya produk asing dalam pertanian, dan bisa sangat mungkin terjadi pembelian-pembelian penguasaan tanah karena petani-petani kecil butuh uang cash untuk menyekolahkan anak dan membayar uang kepada rentenir. Tren ini akan membuat basis masyarakat NU semakin parah merasakan dampak dari kebijakan neoliberal. Ditambah dengan tidak adanya organisasi petani di kalangan basis masyarakat NU yang berbobot, kehancuran pertanian dan kaum tani basis masyarakat NU tinggal menunggu waktu.

Sama dengan di dunia pertanian, basis masyarakat NU ada di sentra-sentra penangkapan ikan laut, mereka menjadi nelayan kecil dan buruh. Mereka ini sama dengan nasib petani NU juga akan merasakan nasib yang tidak jauh berbeda: terdesak hebat ke kerak-kerak pingiran.

Dalam menyikapi fenomena sosial neoliberal, secara umum masyarakat basis NU pasif dan tak berdaya atas terjangan-terjangan hebat neoliberalisme ini, dan karenanya menjadi korban paling depan di antara mata rantai korban-korban neoliberalisme. Secara internal di masyarakat NU mereka tidak banyak memperoleh pencerahan-pencerahan yang berarti, baik dari elit muda Nahdliyin ataupun elit ulama-kiai pesantren. Tentu saja ada kerja-kerja yang dilakukan elit-elit masyarakat Nahdliyin terhadap warga NU, tetapi sebagai kekuatan dan gerakan, apa yang disebut petani, nelayan, dan kelompok marjinal lain di kalangan Nahdliyin belum memiliki "isi" berarti: semu.

²⁴ Data Base KPA yang dikutip oleh Erpan Faryadi, "Pembaruan Agraria sebagai Syarat Kemajuan Desa", dalam *Jurnal Renai*, edisi Musim Hujan, November 2001-Maret 2002, hlm, 91.

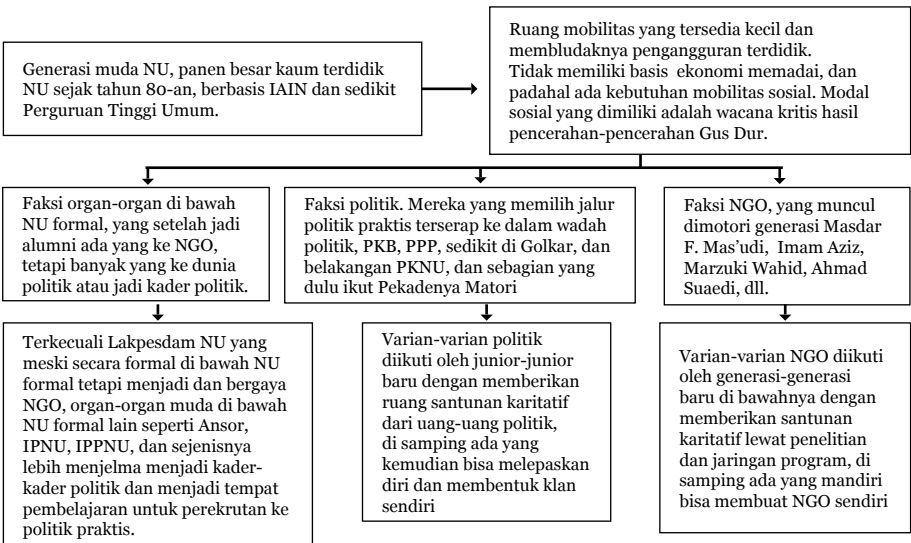
²⁵ Sumber ini merujuk pada data base yang dibuat Dephut dengan judul "Perkembangan Hak Pengusahaan Hutan di Indonesia (HPH Alam) 10 Tahun Terakhir" dimuat dalam situs Dephut (www.dephut.go.id).

D. Melihat Kini: Standing Position Elit Kaum Muda NU

Berbeda dengan warga basis NU yang notabene petani, nelayan kecil, buruh migran dan segmen marjinal lain yang terancam sekarat karena neoliberalisme (juga cenderung pasif dalam menghadapi neoliberal), masyarakat NU juga melahirkan apa yang disebut elit muda Nahdliyin. Elit muda Nahdliyin ini lahir terutama sejak tahun 80-an setelah melakukan urbanisasi dari desa ke kota-kota besar untuk menempuh pendidikan tinggi, terutama di lingkungan IAIN dan sedikit di Perguruan Tinggi Umum. Secara intelektual mereka ini terilhami oleh pencerahan dan pikiran-pikiran kritis Gus Dur setelah menjadi ketua PBNU sejak tahun 1984 di Muktamar NU ke-27 di Situbondo. Meski begitu, ada juga di antara mereka yang kemudian tidak sejalan dengan pilihan politik Gus Dur yang lebih memilih untuk terjun ke jalur politik praktis.

Kelompok elit muda Nahdliyin ini bisa dipetakan ke dalam tiga: kelompok yang berbasis Non-Government Organization (NGO), kelompok yang berbasis politik praktis, dan kelompok yang berbasiskan organ-organ muda dalam NU formal. Bersamaan dengan bangsa yang menghadapi cengkeraman iperialisme neoliberal, justru ketiga kelompok elit muda Nahdliyin ini menghadapi masalah internal yang sama: ruang mobilitasnya sedikit dan pengangguran terdidik semakin membludak. Faksi-faksi di tubuh kelompok muda NU berkaitan dengan patron klien untuk mobilitas sosial yang diikuti, mental perjuangan, dan kebutuhan mendasar untuk bisa bertahan hidup. Bagan I menjelaskan gambaran tentang kondisi kelompok muda NU yang melahirkan beberapa kelompok.

BAGAN I: Alur kondisi kaum muda NU dan munculnya tiga faksi besar



Bagan di atas menjelaskan tiga kelompok muda NU yang masing-masing kelompok memiliki patron dan generasi-generasi baru yang mengikutinya. Standing position ketiga kelompok ini ketika berhadapan dengan tantangan besar neoliberalisme yang mencengkeram bangsa dan mengancam masyarakat basis NU, memiliki karakter sendiri-sendiri.

Kelompok Muda NU Faksi Organ Struktur Formal NU

Kelompok ini tidak menjadi kekuatan yang bisa memandu gerakan masyarakat basis Nahdliyin, dan lebih tepat dilihat sebagai tempat pembelajaran dan pengkaderan di tubuh kepengurusan NU, politik, dan sebagian kecil NGO. Mereka terdiri dari organ-organ di bawah NU seperti Ansor, IPNU, IPPNU, dan sejenisnya. Problem mobilitas sosial selalu menjadi masalah pelik dan menyita waktu hingga menjadikan kelompok ini tidak bisa merespon neoliberalisme secara baik, bahkan merespon soal-soal riil di masyarakat sekalipun.

Yang dilakukan kelompok ini adalah diskusi, training-training, dan sejenisnya yang bernuansa wacana keagamaan. Paling banter ketika membicarakan soal keadilan, kebangsaan, dan sejenisnya hanya sekadar reaktif dan tidak berobsesi untuk menjadi pemandu gerakan masyarakat basis Nahdliyin. Dengan sendirinya sikapnya terhadap neoliberalisme tak pernah jelas, kecuali justru larut dalam skema-skema diskusi dan training dalam obsesi-obsesi sebagai kader politik, kader pengurus formal NU dan sebagian kecil kader NGO, yang tak mempersoalkan imperialisme neoliberal. Kelompok ini dalam taraf tertentu bisa disebut sebagai kelompok belajar untuk menjadi politisi, pengurus NU, dan sebagian kecil yang kemudian beralih ke NGO .

Kelompok Muda NU faksi Politik Praktis

Kelompok ini belum menjadi kekuatan yang bisa memandu gerakan masyarakat basis Nahdliyin untuk memberi alternatif-alternatif brilian dalam menyikapi neoliberalisme. Sebab-sebabnya bisa disebutkan: masih ada dalam dominasi politik partai yang membawahnya, yaitu PPP, PKB, sedikit di Golkar, dan kemungkinan kecil PKNU. Posisi yang selama ini diambil adalah kesibukan luar biasa memberi saluran ruang mobilitas sosial dari generasi-generasi baru NU yang memiliki naluri politik dengan berbagai dampak positif dan negatifnya, di samping upaya mengakumulasi modal pribadi. Kelompok ini juga menjadi kader politisi di PKB, PPP, Golkar, dan kemungkinan kecil di PKNU.

Sementara induk dari partai-partai yang membawahi kelompok muda NU di faksi politik ini, tidak jauh berbeda dengan sikap yang diambil oleh partai politik secara umum: hadir dan bergairah kalau ada pemilu, menjadi partai oposisi tidak-

menjadi partai berkuasa juga tidak karena suaranya tidak mayoritas. Mereka ini tidak menawarkan skema serius dalam merespon neoliberalisme, kecuali reaksi-reaksi kecil dan karitatif, seperti dukungan FKB teradap upaya interpelasi Lumpur Lapindo. Posisi ini tidak menggeser peran partai untuk terlibat dalam skema sistem neoliberalisme dan tidak menawarkan gerakan-gerakan yang lebih radikal kritis dalam melihat neoliberalisme.

Kelompok elit Muda NU faksi NGO

Kelompok ini bercita-cita dan mencoba memberdayakan masyarakat bawah, khususnya masyarakat NU. Hanya saja, meminjam istilah seorang kawan NU, mereka tetap menjadi kelompok “penjelas” atau “NGO penjelas” yang tetap ada dalam skema neoliberalisme.²⁶ Kritisisme baru yang muncul dari kelompok muda NU ini, secara apik dilihat oleh para Funding Agency sebagai potensi untuk memperkuat neoliberalisme dengan melakukan dekonstruksi wacana agama, sesuatu yang secara internal memang dibutuhkan kelompok muda NU. Di sisi lain, kritisismenya dijinakkan dan hanya diberi skema-skema good governance, civil society, anggaran partisipatif, gerakan gender, rekonsiliasi, dan sejenisnya yang sektoral.

Kelompok ini menjadi kelompok kritis di kalangan masyarakat NU, tetapi meminjam istilah kawan tadi, sekadar menjadi “NGO penjelas”, sehingga banyak kelemahannya:

- Tidak menjadi gerakan massif yang terkoordinasi secara baik dan sistemik. Gerakannya hanya bersifat lokal dan isu-isunya parsial, bahkan tak ada koordinasi membuat imajinasi sistem baru bangsa dan negara. Padahal mereka memiliki cita-cita, tetapi belum memiliki imajinasi membuat Indonesia dengan cita-cita itu dalam skala nasional.
- Nyaris setiap NGO di kalangan muda NU, menjadi kerajaan-kerajaan baru yang tidak memiliki arah regenerasi, dan memiliki banyak masalah dalam akuntabilitas, dan friksi-friksi yang tidak mudah diselesaikan.
- Anti politik partai. Padahal di negara-negara maju, kalangan buruh atau pro-kerakyatan mengajukan calon presiden dan membuat partai politik. Kisah sukses gerakan sosial, banyak ditemukan justru karena gerakan sosial, juga mengagendakan adanya gerakan politik: persoalannya bukan menggulingkan rezim semata, tetapi memandu dan membuat sistem yang dicita-citakan bisa dikawal hingga ke perubahan politik.
- Berbasiskan Funding Agency murni, tidak ada sumber dana lain yang diandalkan, kecuali beberapa NGO yang mencobanya. Ketika sudah mendapat dana dari

²⁶ Istilah yang penulis dapatkan dari bincang-bincang dengan sahabat Abdur Rozaki dalam pertemuan membahas visi ICRP di Jakarta, 21 Agustus 2007.

Funding Agency yang cairnya mengatasnamakan label kaum muda Nahdliyin itu, juga masih menjadi persoalan tingkat akuntabilitasnya, dan tingkat kesetiiaannya pada umat. Bahkan dalam beberapa kasus sebuah NGO anak muda NU, yang tengah dirundung duka berlarut-larut, fenomena ini diperparah dengan adanya imajinasi pembagian deposito.

- Isu-isunya tak menyentuh problem ekonomi yang menjadi persoalan utama warga NU, tetapi lebih ke agenda-agenda kritis wacana, yang masih ada di jalur neoliberal: pluralisme yang tidak dikawinkan dengan perjuangan praksis keadilan; gender yang sudah dilepaskan dari analisis ekonomi-politik; dan di mana-mana mengusung good governance, bukan democratic governance yang menjadi basis gerakannya, dan lain-lain.

Dengan melihat standing position dari kelompok-kelompok muda NU, sangat jelas upaya mengubah masyarakat basis NU yang marjinal dan tarancam hebat oleh praktik kebijakan neoliberal belum banyak dilakukan. Posisi-posisi itu bisa dipahami dari argumentasi bahwa kelompok-kelompok muda NU ini disibukkan oleh mobilitas sosial untuk mengatasi problem-problem yang mereka hadapi, bahkan di kalangan kelompok kritis faksi NGO sekalipun. Kompleksitas problem di kalangan anak muda NU dan penyikapannya yang secara praksis “memilih membiarkan neoliberal” meskipun dalam hati ada kekhawatiran terhadap massa bawah,²⁷ akan semakin menambah ruang bebas kehancuran masyarakat bawah yang menjadi basis NU, dengan pengaburan-pengaburan wacana yang dimainkan: menjadi seakan-akan kritis terhadap wacana sosial yang berkembang tetapi tidak menawarkan sebuah pengorganisasian yang bisa diandalkan.

Posisi kelompok-kelompok muda ini lebih mewakili kelasnya sendiri sebagai elit muda Nahdliyin dengan beragam profesi individu daripada mewakili kelas masyarakat basis NU di bawah. Kelompok yang paling kritis dari faksi NGO pun masih sekadar memainkan “penjelasan-penjelasan semata”, belum mampu menggerakkan dan menawarkan sebuah alternatif di tengah adigungnya imperialisme neoliberal.²⁸ Bahkan banyak di antara mereka betul-betul dimanjakan oleh Funding Agency yang bekerja dalam kerangka counter social movement:²⁹ Artinya, mewedahi kritisisme yang muncul di kalangan anak-anak muda NU, tetapi di sisi lain menjinakkannya untuk tidak mempersoalkan perspektif

27 Beberapa kawan yang penulis temui membenarkan dilema ini: antara kepedihan menyaksikan masa depan warga bawah NU dengan kenyataan problem krusial di tingkat mobilitas anak-anak muda NU, menghasilkan “skema kritis tetapi tetap di jalur neoliberal”, karena menurut beberapa kawan ini, memang hanya itu yang bisa dimanfaatkan dan masih mungkin dilakukan sekarang.

28 Kecuali beberapa kasus, anak-anak muda NU sering menyebut Kelompok Salatiga di bawah payung Bahrudin, sebagai benar-benar menawarkan sesuatu.

29 Counter Social Movement, istilah yang penulis peroleh dari bincang-bincang dengan Ahmad Suaedi di Jakarta sekitar tahun 2006, dalam sebuah acara di Ciputat.

ekonomi dan politik Hutang Luar Negeri, Penanaman Modal Asing, skema-skema privatisasi, perdagangan bebas, dan dominasi negara-negara maju: tak boleh mempersoalkan imperialisme.

E. Melihat Kini: Standing Position Elit Ulama-Kiai NU

Hierarki terakhir dalam masyarakat NU adalah elit ulama-kiai pesantren. Dalam struktur masyarakat basis NU, ulama atau kiai menjadi elit yang memiliki posisi berarti, karena dihormati dan dijadikan rujukan untuk persoalan-persoalan keagamaan. Dalam konteks masyarakat basis NU yang lebih besar, ulama atau kiai yang di dalamnya terdapat pesantren menjadi struktur masyarakat tersendiri, dan ini yang oleh Gus Dur disebut sebagai subkultur.³⁰ Juga dalam beberapa hal, kiai atau ulama menjadi agen ide-ide baru, tetapi sekaligus penyensor ide-ide dan budaya yang dianggap kurang sejalan dengan niali-nilai pesantren.

Meski begitu, perlu diakui bahwa ulama dan kiai yang menjadi elit dalam masyarakat basis NU (bahkan menentukan dalam derajat tertentu bagi keberlangsungan elit muda NU), tetap menghadapi persoalan-persoalan eksistensial di dalam dirinya, atau tepatnya kontestasi sesama mereka sendiri. Ini berawal ketika elit ulama-kiai pada umumnya tidak memiliki basis ekonomi yang mapan dan profesional, meskipun sebagian dari mereka memiliki tanah yang cukup. Pada umumnya mereka bersinggungan dengan pertanian, perdagangan, PNS kecil dan sejenisnya tetapi hanya dalam bentuk quasi, sehingga basis ulama-kiai NU pada umumnya berbasiskan quasi petani, quasi pedagang dan PNS kecil.³¹

Latar belakang yang tidak berkaitan dengan mekanisme kerja-kerja seperti perbankan, teknologi, perhotelan, perkapalan, dan sejenisnya menjadikan basis ekonomi ulama dalam beberapa hal mengandalkan akumulasi modal dari perputaran dagang komunal di kalangan internal pesantren, misalnya mengelola catering santri, memproduksi minuman kemasan santri, dan seterusnya, dan tetap menjadi milik pribadi atau keluarga.³² Karenanya, persinggungan-persinggungan dengan dunia politik yang menawarkan janji-janji ekonomi selalu menjadi minat banyak kiai dan ulama, meskipun keterlibatannya dalam dunia politik juga ada

30 Bisa dilihat dalam, Gus Dur, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2004).

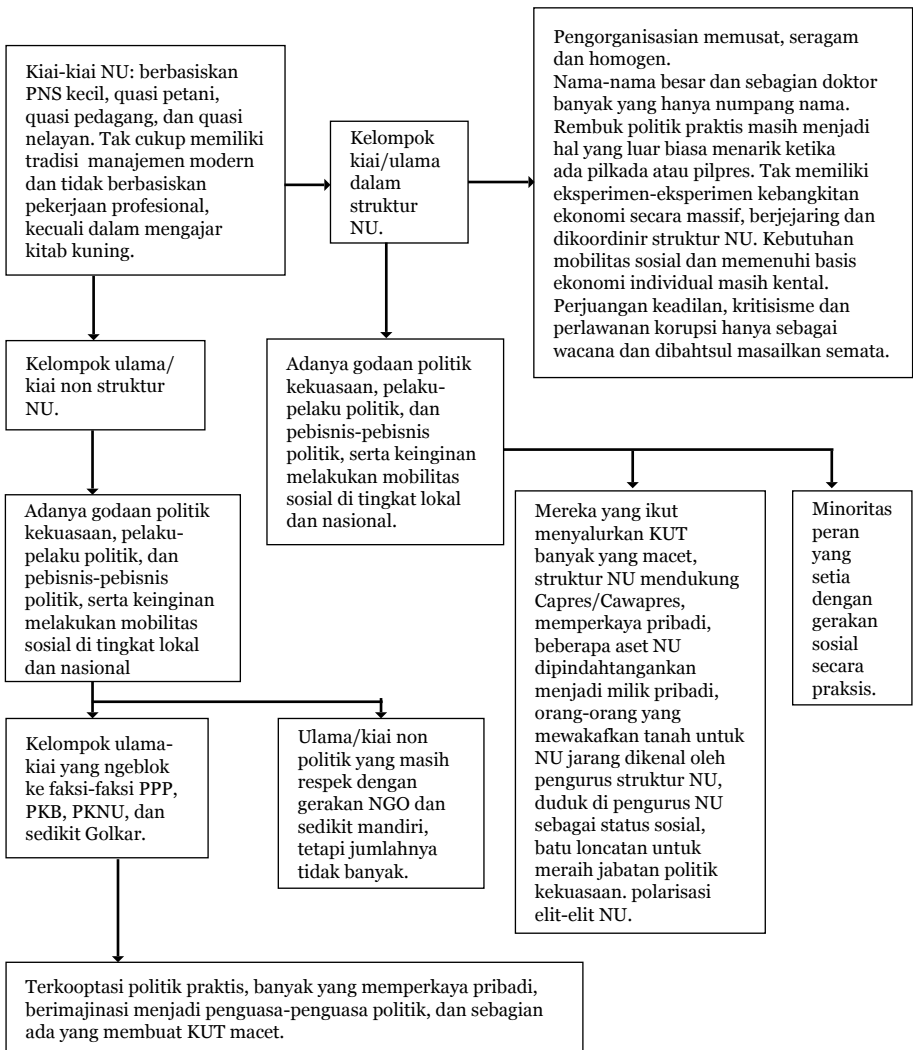
31 Yang dimaksud quasi di sini, semacam pertautan dan pengidentifikasi yang tidak sepenuhnya. Sebagai contoh, elit ulama yang berbasiskan petani, banyak yang memiliki tanah, tetapi tidak mengerjakan tanah itu sendiri, tetapi pemanfaatan tanah dengan menyuruh orang lain atau santri-santrinya. Sementara elit ulama yang demikian masih mencari sumber finansial lain di luar pertanian. Dalam hal ini bila ulama berbasiskan petani, ternyata tidak betul-betul petani, bahkan mungkin kesadaran tentang kelas petani menjadi tanda tanya sendiri, karena imajinasi mewakili kategori ulama jauh lebih dominan daripada mewakili kelas petani.

32 Beberapa pesantren telah memiliki koperasi yang cukup baik, dan salah satunya adalah pesantren Sidogiri, Pasuruan. Lihat perkembangan Kopontren Sidogiri ini dalam, H. Mahmud Ali Zein, "Model-model Perkembangan Ekonomi Pondok Pesantren: Pengalaman PP Sidogiri Pasuruan", dalam A. Halim, Rr Suhartini, M. Choirul Arif, dan Ahmad Suanrto AS (eds.), Manajemen Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005); dan lihat juga, Dirjen kelembagaan Agama Islam Depag RI, Potensi Ekonomi Pondok Pesantren di Indonesia (Jakarta: Dirjen kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2004).

dimensi di luar faktor ekonomi ini. Faksi-faksi yang muncul di kalangan kekhiaian, juga banyak dilatarbelakangi oleh nuansa-nuansa politis-ekonomis ini.

Elit kiai-ulama NU dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok: kiai pejabat NU, ulama non politik, dan kiai politik. Masing-masing kelompok ini juga memiliki berbagai variasi, terutama dalam variasi kelompok kiai politik. Respon dan standing position elit ulama-kiai kaitannya dengan perubahan sosial dan kebijakan-kebijakan neoliberal juga perlu mengaitkan dengan kelompok-kelompok kekhiaian ini. Dalam bagan II dapat dilihat alur terbentuknya faksi-faksi dalam elit kiai-ulama NU.

BAGAN II: Alur terbentuknya kelompok-kelompok elit ulama-kiai NU



Bagan ini menjelaskan adanya dua kelompok besar kiai-ulama NU: kelompok struktur NU dan kelompok non-struktur NU. Dalam kelompok non-struktur NU, ada kelompok ulama politik dan ada juga non politik. Kelompok elit ulama/kiai struktur adalah mereka yang menjadi pengurus formal NU dari PBNU hingga ranting NU. Kelompok elit ulama/kiai politik adalah mereka yang masuk blok-blok formal PKB, PPP, PKNU, Golkar, dan partai-partai lain. Kelompok elit ulama/kiai non politik adalah mereka yang tidak terlibat dalam formal pengurus NU dan tidak menjadi bamber partai politik, meskipun dalam pemilu mereka ikut mencoblos partai-partai berbasikan kiai/ulama NU. Meski begitu juga harus diingat, kelompok non politik tetap ada irisan-irisan quasi politik, yaitu mereka yang tetap respek dengan model gerakan sosial tetapi juga masih menjadi bamber kultural dari partai-partai politik berbasikan ulama NU.

Kelompok elit ulama-kiai politik

Elit-elit ulama/kiai yang ada di dalam faksi ini, karena ada di bawah naungan partai politik seperti PKB, PPP, PKNU, Golkar, dan partai-partai lain, maka posisi mereka terhadap kebijakan neoliberalisme juga banyak berkaitan dengan sikap dan posisi partai-partai itu. Secara personal, elit ulama/kiai NU politik ini cukup fasih dalam menguasai kitab-kitab kuning, tetapi belum banyak menguasai sosiologi ekonomi, apalagi sosiologi imperialisme di zaman kini. Ini bisa dipahami, karena pesantren-pesantren yang menjadi basis ulama dan kiai masih kuat memegang tradisi kitab kuning, dan dalam taraf tertentu bacaan-bacaan tentang teori sosial dan perubahan sosial masih minim.³³ Masalahnya, jumlah kelompok elit ulama/kiai NU politik dalam kekhiaian masyarakat NU ini sangatlah besar.

Mengharapkan elit-elit ulama/kiai ini untuk merespon neoliberalisme, masih sulit kecuali harapan itu diletakkan ke pundak partai-partai yang menjadi pilihan mereka. Sementara meletakkan harapan kepada partai-partai yang ada selama ini, seperti kritik Sujiwo Tejo menarik untuk dikutip: “Kalau aku nggak yakin, orang politik itu sama dengan pedagang, bukan dalam arti buruk, tetapi logika pedagang saiki masyarakat njaluke opo? Kalau masyarakat butuh rujak cingur ya mereka jualan rujak cingur...”³⁴ Partai-partai sekarang ini tidak pernah jelas. Kalau mereka tidak menang mayoritas, tetapi tidak pernah mau menjadi oposisi, dan yang kalah pun bisa beraliansi untuk berkuasa. Belum lagi, kehadiran partai politik hanya ada ketika Pemilu dan Pilkada, sangat permisif dan tidak menawarkan alternatif-alternatif brilian untuk merespon imperialisme di zaman kini.

33 Beberapa rujukan untuk menggambarkan ini bisa dilihat dalam Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1994), Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, Tarekat* (Bandung: Mizan, 1999), dan banyak yang lain. Meski begitu perkembangan terakhir banyak pesantren yang memiliki perpustakaan dengan “buku-buku putih” (buku non kitab kuning dan buku-buku sosial, meski belum menyentuh ke teori-teori Marxis, jalan ketiga, neoliberal, dan sejenisnya).

34 Sujiwo Tejo, “Seni untuk Bangsa Munafik”, dalam *Majemuk*, edisi Juli-Agustus 2007, hlm. 52.

Kelompok elit ulama/kiai non-politik

Elit-elit ulama/kiai yang ada di dalam faksi ini jumlahnya sedikit, bahkan sangat sedikit. Mereka yang non-politik, memiliki respektif terhadap upaya-upaya yang dilakukan elit muda NU faksi NGO. Meski begitu, elit ulama/kiai jenis ini tidak benar-benar terlibat secara praksis sebagaimana elit muda NU faksi NGO. Dalam upaya pencerahan yang dilakukan oleh elit muda NGO, kiai-kiai non-politik berposisi sebagai payung, dan kegiatan sehari-harinya masih berkutat di pesantren dengan wacana-wacana agama semata. Irisan-irisan lain dari kiai jenis ini adalah simpatisan dari partai politik tertentu, tetapi tetap respek dengan gerakan-gerakan elit muda NU faksi NGO; dan elit-elit ulama yang berinisiatif melakukan kemandirian tetapi masih sebatas untuk konteks pesantrennya dan lokal.

Karena jumlah elit ulama-kiai NU non politik hanyalah sedikit dan adanya hubungan simbiosis dengan elit muda NU faksi NGO, maka respon-respon yang dilakukan elit ulama/kiai non-politik tidak cukup berarti secara nasional. Secara substansial posisinya hampir sama dengan posisi yang diambil oleh elit muda faksi NGO dalam menempatkan diri dengan kebijakan dan tatanan neoliberal. Neoliberalisme direspon dengan mempersilahkan elit-elit muda NU faksi NGO untuk mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi, seminar, halaqah, training, dan sejenisnya yang tetap berhenti dalam kerangka “penjelasan-penjelasan”.

Kelompok elit ulama-kiai struktural NU

Elit-elit ulama/kiai yang ada di dalam faksi struktural NU, jumlahnya cukup banyak, tetapi tidak sebanyak elit ulama-kiai politik. Kiai-kiai dan ulama jenis ini adalah mereka yang menjadi pengurus NU. Sedangkan elit ulama-kiai politik, bukan hanya mereka yang tercantum dalam struktur partai politik, tetapi juga mereka yang ada di masyarakat, yang secara kultural menjadi bamber partai-partai politik. Karenanya, elit ulama-kiai NU kelompok struktural NU jumlahnya masih kalah dengan mereka yang masuk kelompok ulama-kiai politik. Meski begitu, karena ulama-kiai politik terdiri dari berbagai varian sesuai dengan partai yang menjadi anutan dan patronnya, maka jumlah elit ulama-kiai NU struktur NU terhitung cukup besar dibandingkan dengan pecahan-pecahan dari kelompok ulama politik. Irisan dari kelompok ini adalah mereka yang juga aktif di partai politik tetapi sekaligus menjadi pengurus NU.

Melihat posisi kiai dan ulama jenis struktural NU ini sama dengan membicarakan posisi praksis struktural NU itu sendiri. Dalam konteks ini, sebenarnya ada upaya-upaya serius ketika PBNU dipimpin Gus Dur untuk membentuk ribuan BPR dalam kerangka Nusuma, tetapi ternyata gagal karena hadangan penguasa saat itu.³⁵

³⁵ Kegagalan di masa Gus Dur diakui sendiri dalam laporan pertanggungjawaban PBNU di Lirboyo dengan kata-kata: “Dalam usaha membangun institusi warga dengan infrastrukturnya, NU mengalami kegagalan

Praktis setelah itu, belum ada usaha-usaha serius untuk bereksperimen membuat koperasi-koperasi rakyat (meskipun di beberapa pesantren ada koperasi yang didirikan), mengorganisasi kaum tani NU, kaum buruh NU, dan para nelayan kecil NU. Yang mengherankan, belum ada upaya-upaya serius dalam memperjuangkan tatanan agraria yang adil dan berpihak kepada petani, yang padahal perjuangan ini akan menguntungkan umat basis NU yang mayoritas petani segala jenis.

Tentu saja harus diakui ada usaha-usaha untuk melakukan gerakan anti korupsi, membuat seminar-seminar tentang Islam radikal, membentuk ICIS (International Conference of Islamic Scholars), memberi tausiyah-tausiyah dalam soal lingkungan hidup, dan telah membicarakan masalah-masalah yang muncul dalam kerangka bahsul masail.³⁶ Dalam kerja-kerja ini semua, susah untuk tidak mengatakan hanya berhenti di tingkat wacana, dan yang terpenting, kerja-kerja itu tidak dibingkai dalam kerangka gerakan sistemik seperti apa yang akan diperjuangkan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, dan sejahtera dalam naungan NKRI.

Bingkai dan narasi besar yang dibangun tidak pernah muncul, kecuali slogan memperjuangkan ahlusunnah waljamaah dalam NKRI dan Pancasila, yang dalam isinya susah dicari bentuknya. Ketiadaan bingkai untuk memberi isi kepada Indonesia, menyebabkan kritik-kritik NU tentang korupsi, tausiyah tentang lingkungan dan sejenisnya, tetap berada dalam kerangka reaktif, tetap ada dalam sistem neoliberal dan kebijakan-kebijakan neoliberal. Sebagai organisasi yang berbasiskan petani dan nelayan kecil di desa-desa, bahkan elit ulama-kiai struktural NU belum pernah menjadi garda depan dalam mengonsolidasikan petani-petani Indonesia untuk memperjuangkan nasibnya yang terancam secara hebat karena tatanan neoliberal dan hajaran-hajaran penguasa lalim.

Dengan begitu, standing position yang dimainkan elit-elit ulama-kiai NU dalam kerangka kebijakan neoliberal: respon-respon yang diberikannya sangat pasif, kritik-kritik yang muncul masih dalam kerangka sistem neoliberal, belum memiliki bingkai untuk merespon sosiologi imperialisme zaman kini, dan belum bisa menjadi penggerak perekonomian umat. Sebaliknya dalam Pilpres dan Pilkada, elit ulama-kiai struktural NU justru banyak yang tergoda untuk bermain-main politik praktis dengan hanya mempertimbangkan aliansi-aliansi sesaat untuk keuntungan elit semata.

yang cukup mencolok baik dalam usaha-usaha perbankan maupun usaha produksi yang mencita-citakan keterlibatan masyarakat petani. Lihat kutipan ini dalam PBNU, Hasil-hasil Muktamar NU XXX (Jakarta: PBNU, 2000)., hlm. 37.

36 Muhyidin Arubusman dan Syaiful Bahri Anshori (ed.), *Di Kala Transisi Tersandung: Narasi Khidmah Nahdlatul Ulama 1999-2004* (Jakarta: tnp., 2004).

F. Respon atas Neoliberal: Modal Sosial yang Dimiliki Masyarakat NU

Di tengah posisi-posisi sosial yang diambil, masyarakat basis NU yang tragis dan cenderung pasrah, posisi sosial elit-elit masyarakat NU seperti elit muda NU dan elit ulama-kiai pesantren yang tergerus dalam terjangan-terjangan hebat neoliberal dan menjadikan mereka limbung, sebenarnya organisasi kaum sarungan yang bernama NU ini, memiliki modal sosial yang berarti untuk merespon kebijakan dan tatanan neoliberal.

Setidaknya masyarakat NU memiliki tiga modal sosial yang berarti untuk menatap masa depan kaum sarungan ini: keyakinan dasar yang masih terpatni dalam Anggaran Dasar NU tentang perjuangan faham kerakyatan; telah lahirnya elit-elit muda NU yang bisa memahami sosiologi imperialisme zaman kini, atau setidaknya mengawinkan antara kitab kuning dengan teori-teori perubahan sosial; dan memiliki jaringan luas serta sejarah kemandirian dalam pergumulan sosial, setidaknya dicontohkan dalam pendirian dan keberlangsungan pesantren.

Faham Kerakyatan NU

Dalam seluruh fase Anggaran Dasar NU, sebenarnya dalam masalah sosial kemasyarakatan NU memperjuangkan cita-cita “faham kerakyatan”: orientasi, keyakinan, dan keberpihakan dalam masalah sosial berpijak kepada rakyat, yang tercermin dalam pembelaannya pada keadilan, perlunya pemerataan pembangunan terhadap semua lapisan masyarakat, dibangunnya pilar-pilar ekonomi rakyat seperti koperasi, memberdayakan kemandirian, dan keberpihakan yang jelas terhadap penindasan kemanusiaan.

Cita-cita NU tertuang dalam Anggaran Dasar NU saat didirikan pertama kali tahun 1926 (Statuten NU) yang dimuat dalam Extra Bijvoegsel der Javasche Courant van 25/2-1030 No. 16 tertanda De Algemeene Secretaris, GR. Erdbrink menyebutkan salah satunya: “...memperhatikan ihwal anak-anak yatim dan para fakir miskin; dan mendirikan badan-badan usaha untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, dan perusahaan yang tidak dilarang syariat agama Islam.”³⁷

Ketika NU memutuskan untuk mengakhiri persekutuan dengan Masyumi secara resmi tanggal 31 Juli 1952, NU kemudian berijtihad menjadi partai politik.³⁸ Ini berlangsung sejak NU ikut pemilu tahun 1955 hingga ikut fusi dalam PPP di masa kekuasaan Soeharto, dan tahun 1984 kembali ke khittah 1926. Anggaran Dasar NU ketika menjadi partai politik tahun 1952 menyebutkan, salah satunya

37 Dokumen Statuten NU tahun 2006 dapat dilihat dalam, H. Aboe Bakar, KH.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar ..., hlm. 503.

38 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 97 dan seterusnya.

“Memperhatikan tentang perekonomian umat”.³⁹

Perkembangan cita-cita NU tampak ketika Mukhtamar ke-27 tahun 1984 yang diadakan di Situbondo. Dalam mukhtamar NU ke-27 ini keputusan penting dilahirkan sebagaimana dapat dilihat dalam cita-cita penting dalam AD NU ketika kembali ke Khittah ini di antaranya: “Bidang sosial, mengusahakan terwujudnya keadilan dan keadilan hukum di segala lapangan bagi seluruh rakyat untuk menuju kesejahteraan umat di dunia dan keselamatan di akhirat; dan “bidang ekonomi, mengusahakan terciptanya pembangunan ekonomi yang meliputi berbagai sektor dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya “koperasi”.⁴⁰

Sampai tahun 2004 dan 2007, cita-cita NU masih dirumuskan salah satunya: bidang sosial, mengusahakan terwujudnya kesejahteraan rakyat dan bantuan terhadap anak yatim, fakir miskin serta anggota-anggota masyarakat yang lainnya; bidang ekonomi, mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi dengan mengupayakan pemerataan kesempatan untuk berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan, dan berkembangnya ekonomi kerakyatan; dan mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna mewujudkan khaira ummah.⁴¹

Kalau disimpulkan dari perkembangan cita-cita NU ini, sebenarnya NU memperjuangkan dua hal: dalam soal agama, memperjuangkan berlakunya ajaran Islam Ahlussunnah waljamaah yang menoleransi cara madzhab di dalam masyarakat; dan membela kelompok-kelompok marjinal yang dirumuskan dengan pembelaan atas anak-anak yatim, fakir miskin, dan anggota masyarakat lainnya yang sejenis dengan mendukung ide pembangunan berbasis kerakyatan. Setidaknya ada cetak biru dan legitimasi kokoh dari dasar-dasar NU sendiri: untuk memperjuangkan keadilan, pemerataan pembangunan, membangun pilar-pilar ekonomi rakyat seperti koperasi, dan komitmennya untuk memperjuangkan kemanusiaan.

Munculnya elit-elit muda NU

Sejak tahun 80-an ketika PBNU dipimpin Abdurrahman Wahid, di kalangan muda NU telah lahir banyak sarjana, yang meski lulusan IAIN, tetapi bacaan-bacaan mereka yang luas sampai menyentuh Karl Marx, Antonio Gramsci, Paulo Freire, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, Derrida, dan banyak pemikir sosial lain. Latar belakang anak-anak muda NU yang pada dasarnya dibangun dengan basis kitab kuning, pembacaan dan referensi luas ini akan memberi sumbangan berarti

39 Dokumen AD NU ketika menjadi partai politik dapat dilihat dalam, H. Aboe Bakar, KH.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar ..., hlm. 509.

40 Lihat dalam, Hasil-hasil Mukhtamar NU ke-27 Situbondo (Semarang: Sumber Barokah, t.t.).

41 AD NU tahun 2004 dapat dilihat dalam lajur kiri tulisan PBNU, Draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Mukhtamar NU ke-31 (ttp.: ttp., t.t.).

bagi pemikiran-pemikiran tentang nasib dan masa depan NU ke depan, dan ini akan menjadi modal sosial bagi masyarakat NU.⁴² Menjelang seabad NU, lahirnya kelompok muda ini akan semakin banyak, meskipun kebutuhan ruang mobilitas sosial menjadi tantangan tersendiri.

Jaringan luas dan sejarah kemandirian

Modal sosial yang lain adalah luasnya jaringan masyarakat pesantren, hingga menyentuh ke seantro desa-desa, dan bahkan sedikit dijumpai ada kelompok yang memiliki jaringan seluas ini. Di samping jaringan yang luas, modal sosial masyarakat NU didukung oleh sejarah pesantren sendiri yang lahir dari sebetuk kemandirian ulama atau kiai, dan masyarakat setempat untuk membangun apa yang mereka butuhkan. Banyak pesantren yang lahir dari kemandirian ini,⁴³ meskipun di perkembangan selanjutnya “cara kerja proposal” telah menggerogoti sejarah kemandirian ini. Sikap kemandirian ini tentu menjadi modal sosial di mana masyarakat NU pernah memiliki imajinasi dan pernah mewujudkan imajinasi itu, dan ternyata bisa dilakukan dengan kemandirian.

Tiga modal sosial di atas akan sangat berarti untuk menghadapi perjalanan NU ke depan. Masalahnya, apakah modal sosial di atas jauh lebih canggih atau lebih kuat daripada hambatan-hambatan nyata yang dihadapi masyarakat NU adalah persoalan yang tidak mudah dicari jawabannya. Pertarungan antara hambatan dan problem-problem dengan kemampuan modal sosial di atas inilah yang menentukan bagaimana nasib masa depan masyarakat NU ke depan, di samping kerja keras merancang desain jangka panjang masyarakat Nahdliyin.

G. Respon atas Neoliberal: Hambatan yang Dimiliki Masyarakat NU

Di samping masyarakat NU memiliki modal sosial yang bisa diandalkan untuk menatap dan menghadapi masa depan kaum sarungan, masyarakat NU juga memiliki hambatan-hambatan yang serius. Hambatan-hambatan ini, menyangkut banyak hal: ruang mobilitas yang sempit di tengah membludaknya jumlah warga NU; mental yang belum sepenuhnya bisa beradaptasi dengan manajemen modern; terkotak-kotaknya jaringan luas masyarakat Nahdliyin yang tidak dibarengi dengan solidaritas ke-NU-an yang kuat; sikap sosial yang cenderung ambigu diilhami oleh

42 Salah satu buku untuk menjelaskan kelompok muda NU bisa dilihat dalam, Laode Ida, *NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru* (Jakarta: Erlangga, 2004).

43 Sebagai contoh, penulis dulu pernah nyantri di PP Darunnajah Tanjungsari Banyuwangi. Pesantren ini didirikan atas inisiatif sang kiai saat itu, KH. Dardiri Salam di sebuah petak tanah mertuanya. Selang beberapa tahun masyarakat ikut membantu dalam proses pendiriannya. Contoh yang lain tentang beberapa kemandirian pendirian pesantren bisa dilihat dalam sejarah-sejarah pesantren yang dimuat dalam buku Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren ...*, ketika menjelaskan masalah unsur-unsur penting sebuah pesantren; Endang Turmudzi, *Perselingkuhan Kiai dan kekuasaan* (Yogyakarta: LKIS, 2004), dan lain-lain.

paham Aswaja yang masih dimaknai secara pasif; dan adanya pola mental baru yang mengandalkan hidup dengan proposal dan proyek semata, sementara basis mental soal dalam hal manajemen belum berubah.

Sempitnya Ruang Mobilitas Sosial

Di dalam masyarakat Nahdliyin, ruang mobilitas sosial yang kecil ini hampir-hampir bisa dikatakan menyita banyak potensi modal sosial yang dimiliki. Sementara jumlah warga yang begitu banyak membutuhkan ruang mobilitas sosial ini. Dalam hal ini, ruang mobilitas sosial masyarakat NU, hanya di partai politik berbasiskan warga NU, seperti PKB, PPP dan sedikit Golkar; di pengurus formal NU; dan di pemerintahan hanya relatif ada di Depag. Dua yang pertama, sama sekali tidak bergaji, yang posisi-posisi itu akhirnya membuat upaya-upaya mencari gaji mandiri dengan jalan apa pun, bahkan dengan jalan memanfaatkan jabatan-jabatan sipil NU itu. Parahnya lagi, ruang mobilitas di partai berbasiskan warga NU dan di pengurus NU ini, juga masih didominasi oleh klan-klan kiai dan ulama pesantren semata. Padahal masyarakat basis NU terus mengalami regenerasi, dan kelompok muda NU juga terus mengalami regenerasi, tetapi posisinya tidak cukup menentukan ketika mereka melakukan aliansi-aliansi dengan kelompok elit ulama.

Dampak dari ruang mobilitas yang kecil ini, akan memperumit inisiatif-inisiatif yang berdimensi jangka panjang, karena kerja-kerja dan langkah taktis yang dilakukan masyarakat Nahdliyin akan tersita oleh persoalan-persoalan mendesak tentang fundamen ekonomi keluarga di antara masyarakat dan aktivis Nahdliyin sendiri. Ini menjadikan mental pragmatisme dan oportunistik bisa mudah dijadikan basis pijakan.

Masalah mental dan manajemen modern

Di masyarakat Nahdliyin basis pengetahuan dari pesantren untuk menjadi pemandu tindakan masih sangat dominan, termasuk dalam soal pengelolaan kehidupan publik sekalipun. Dalam konteks itu, cara pandang praksis dunia pesantren yang dominan untuk mengelola publik adalah manajemen keluarga (bahkan personal), dan tidak ada manajemen kontrol publik. Pola ini bisa dirasionalisasikan, karena memang sejarah awal dari berdirinya sebuah pesantren adalah upaya-upaya personal yang kemudian didukung masyarakat.⁴⁴ Ketika manajemen keluarga ini diterapkan dalam kehidupan publik, atau ketika masyarakat Nahdliyin berinteraksi dengan publik atau dalam soal publik, basis pengetahuan awal tentang manajemen keluarga dan personal masih belum bisa dipotong sepenuhnya.

Di kalangan kelompok yang paling kritis sekalipun, katakanlah di kelompok elit muda NU faksi NGO, masalah ini juga masih menjadi persoalan serius.

44 Zamakhsari Dhofier, *Traidisi Pesantren ...*, hlm. 100, dalam kasus Tebu Ireng dan Tegalsari.

Beberapa NGO telah rontok dan mengalami konflik terus menerus karena belum bisa menerapkan manajemen yang canggih dan masih mengandalkan manajemen sebagaimana mereka dulu dididik dalam lingkungan yang diiri dengan manajemen keluarga/personal tanpa kontrol publik. Bahkan seorang elit muda NU faksi NGO yang pernah penulis temua pernah mengatakan: “ Di NU sendiri masalah harta publik masih menjadi perdebatan, dan karena harta publik bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik, sehingga ini tidak menyadarkan kepada mereka yang berinteraksi dengan harta publik, bahwa kepentingan publik tidak bisa didistorsi dengan mengambil uang publik seenaknya, lalu dibagi-bagikan atas nama orang-orang tertentu sebagai bagian dari masyarakat.”⁴⁵ Padahal dalam terminologi modern cara-cara distorsi seenaknya atas harta publik itu adalah bagian dari korupsi. Parahnya memang hal ini masih menjadi hambatan di masyarakat Nahdliyin karena mereka belum bisa memotong mental manajemen keluarga ketika harus berinteraksi dengan publik.

Masalah Solidaritas dalam Jaringan Luas Nahdliyin

Hambatan yang dimiliki masyarakat Nahdliyin justru berkaitan dengan luasnya jaringan kalangan Nahdliyin: di berbagai pelosok pesantren, di partai seperti PPP, PKB, PKNU, Golkar, dan lainnya. Jaringan yang luas ini sudah terkotak-kotak dan sifatnya bukan lagi sebagai taktis dalam kerangka besar NU, tetapi mereka yang terkotak-kotak itu merepresentasikan dirinya dan kelompoknya, tidak lagi ke-NU-annya. Tidak ada solidaritas yang cukup dan berbobot dalam jaringan yang luas ini. Jaringan-jaringan di masyarakat Nahdliyin bekerja sendiri-sendiri atas nama bingkai patron sosial yang dianutnya. Yang di politik loyal dengan partainya, dan yang di NGO loyal dengan seniornya di NGO, dan begitu juga dalam segmen yang lain.

Akibatnya sangat jelas, jaringan yang luas ini pada dasarnya adalah lemah, kurang berbobot. Jaringan yang semestinya bisa menjadi katalisator mobilitas sosial warga NU justru harus berbenturan oleh pertikaian-pertiakain endemik seturut dengan patron yang diikutinya. Dalam jangka pendek, ketiadaan solidaritas yang dipayungi dalam bingkai kepentingan jangka panjang masyarakat NU, memang bisa menyediakan ruang sesaat untuk mobilitas sosial dan menjamin sustainable individual dan kelompok, tetapi dalam jangka panjang justru akan menjadi penambang dari kerontokan NU dalam bentuk butiran-butiran pasir kecil yang mudah dihempaskan gelombang laut.

45 Bincang-bincang dengan kawan muda NU berinisial F di Jogjakarta tahun 2006, di sebuah NGO milik anak muda NU.

Masalah Ketergantungan dengan Funding

Pada zaman ini, pola agraris di kalangan pesantren di mana hidup dan mencari uang harus diasal dan diciptakan lewat kerja keras mencangkul dan terjun ke sawah, ladang, hutan, dan laut, seiring dengan perubahan zaman telah berganti total di mana uang sekarang ini mudah didapat elit dengan menjual proposal dan proyek. Bukan hanya para aktivis dan elit muda berbasikan NGO, tetapi juga para elit ulama-kiai sekarang ini sudah sangat fasih dan pintar untuk membuat proposal kegiatan. Cara hidup baru yang diskemakan oleh para Funding Agency, yaitu membuat proposal dan dapat uang berlimpah telah menjadi gaya hidup masyarakat Nahdliyin. Seorang kawan di Jakarta yang merupakan mata rantai pola hidup ini pernah menuturkan: “Di sini, kita tidak memiliki pekerjaan yang jelas, tetapi soal uang tidak pernah kekurangan,” soal pertanggungjawaban urusan belakangan⁴⁶

Perlu digarisbawahi bahwa anti funding dan anti proposal jelas sebuah kekeliruan, tetapi sepenuhnya menggantungkan dengan funding sama dengan kondisi bangsa Indonesia yang didanai dengan basis Hutang Luar Negeri (HLN). Di tahap awal proses proyek proposal sangat bisa ditoleransi, tetapi kalau selanjutnya terus menerus bebasiskan Funding Agency akan menyebabkan: memanjakan elit-elit NU, menumpulkan gerakan NU sesuai dengan pesanan funding, dan menjadikan gerakan NU tidak berwibawa meski dibungkus bahsul masail secanggih apa pun.

Sebenarnya, pada awalnya masyarakat NU menoleh ke funding sebagai langkah taktis, dan masyarakat NU membedakan dengan yang substansi dari perjuangan yang semestinya dicita-citakan. Masalahnya kini, yang disebut taktis itu berubah menjadi substansi karena tidak lagi dipandang sebagai taktis, tetapi sudah berbalik menjadi sebuah tujuan dan sumber mendasar ketergantungan. Dalam jangka panjang, ini akan membuat masyarakat Nahdliyin semakin mundur inisitaif-inisitif lokal dan basisnya, justru kandas oleh kelakuan para elitnya sendiri, baik yang muda atau yang ulama.

Masalah Respon sosial pasif-reaktif

Sikap sosial yang cenderung ambigu untuk melihat masalah sosial, juga masih banyak menjadi ilham dan penuntun dari masyarakat Nahdliyin. Jargon-jargon semisal “Daripada anarki lebih baik menoleransi apa yang sedang berjalan”, masih menjadi basis pengetahuan yang penting dan menjadi bumper untuk tidak menuntut keadilan, menegakkan hukum, dan sejenisnya secara praksis-konsisten. Pengarusutamaan model reaktif yang memang menjadi khas, menjadikan posisinya pasif dalam memandu gerakan perubahan sosial, sebagaimana sikap anti politik dan lari dari masalah yang diperlihatkan beberapa sahabat Nabi Muhammad atas

⁴⁶ Bincang-bincang dengan seorang kawan NU di Jakarta berinisial S di tahun 2006.

kisruh yang terjadi di zaman sahabat dan masa sesudahnya.⁴⁷

Dampaknya jelas, pola pasif dan rekatif yang di masa lalu menjadi sindrom kekalahan ini, telah melahirkan pola-pola pragmatis yang dibungkus dengan jargon-jargon agama; selalu tertinggal dari kelompok lain, karena belum memikirkan pola desain aktif untuk rekayasa ke depan dalam mempengaruhi perubahan; dan menunggu sampai apa yang terjadi dan kemudian siap berada di depan sebagai bumper, tetapi tidak pernah mendapatkan apa-apa, dan anehnya posisi yang seperti itu dibangga-banggakan karena menjadi pahlawan bak pasukan infantri di medan tempur yang dicekoki para jenderal.

Hambatan-hambatan yang dimiliki masyarakat NU ini akan terus menjadi krusial dalam negosiasi-negosiasi dengan modal sosial yang dimilikinya. Tindakan-tindakan masyarakat NU secara praksis, dan itu tampak dalam standing position yang dimainkan oleh masyarakat NU sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya hasil dari negosiasi-negosiasi antara hambatan-hambatan ini dengan modal sosial yang dimilikinya. Masalahnya, negosiasi tak selalu menguntungkan dan tidak kunjung membuat nasib baik masyarakat Nahdliyin, karena negosiasi-negosiasi sosial di masyarakat Nahdliyin mengorbankan dimensi jangka panjang, dan hanya tergerus oleh arus sesaat dan semu, apalagi kalau hanya menguntungkan secara individu elit.

H. Respon NU atas Neoliberal: Akan bagaimana dan Mau Berbuat Apa?

Neoliberalisme, suka atau tidak harus direspon oleh NU, karena basis massa NU-lah (bersama kelompok lain yang memiliki basis sejenis dengan NU) yang akan merasakan paling parah akibat kebijakan neoliberal hari ini dan di masa-masa mendatang. Dalam merespon neoliberalisme, penting melihat dua hal: mengukur kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan dan modal sosial yang dimiliki masyarakat NU untuk merumuskan langkah taktis; dan juga penting melihat dan mengarahkan respon terhadap neoliberalisme dalam kerangka standing position apa yang perlu dimainkan NU sebagai bingkai dari langkah taktis itu. Bingkai untuk memayungi standing position yang perlu dimainkan NU inilah yang penting ditemukan, karena tanpa ini kerja-kerja di lapangan tidak akan memiliki arah yang jelas, dan hanya menguap dan kelelahan tanpa ada narasi yang akan diperjuangkan.

⁴⁷ Di dalam NU memang telah terjadi perdebatan tentang Aswaja yang dapat dilihat dalam, Imam Baihaqi (ed.), *Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi* (Yogyakarta: LKIS, 2000), tetapi perdebatan yang awalnya dipicu dari makalah KH. Dr. Said Aqil Siradj ini di samping mendapat tantangan keras juga belum menjadi cetak biru rumusan Aswaja sesuai dengan konteks zaman kini, sehingga imajinasi Aswaja yang non-politik dan masih ambigu dalam melihat perubahan sosial sangat kentel.

Kerangka Besar yang Perlu Diperjuangkan

Dalam merespon neoliberalisme, penting melihat bahwa neoliberalisme bukan hanya ide-ide pasar bebas dan kebijakan-kebijakan pro-TNCs dan negara-negara maju, tetapi juga kepentingan-kepentingan dari negara maju dan perusahaan-perusahaan besar negara maju itu sendiri untuk mengkoloni negara-negara miskin (seperti Indonesia) dengan cara finansial, bukan lagi dengan todongan senjata. Tujuannya jelas, adanya dominasi dan ekspansi finansial yang menurut William K Tabb adalah pusat-pusat kapitalisme melakukan ekspansi ke negara-negara berkembang untuk menghindari krisis domestik mereka.⁴⁸ Hanya dengan mengkoloni dan menguras kekayaan alam, pertambangan, laut, dan hutan negara-negara miskin (tetapi kaya alamnya) itulah negara-negara maju akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan energi mereka dan kebutuhan-kebutuhan mereka jangka panjang, dan tetap bisa menjadi pusat dari dunia.

Dengan sendirinya, neoliberalisme mesti dipahami sebagai bagian mendasar dari imperialisme yang bekerja dengan tiga tingkatan hierarki: level dunia internasional, level nasional negara-bangsa dan level masyarakat bawah. NU yang dalam cita-citanya menyebutkan akan memperjuangkan “faham kerakyatan”, cukup jelas untuk menjadi alasan menempatkan neoliberalisme sebagai bagian dari imperialisme ini; hasil-hasil keuntungan neoliberalisme yang dinikmati negara-negara maju dan akumulasi modal ke segelintir orang, serta dampaknya yang buruk bagi bangsa Indonesia dan basis masyarakat NU sendiri, juga cukup jelas untuk menempatkan neoliberalisme sebagai bentuk imperialisme yang merontokkan sendi-sendi masyarakat NU. Dalam kerangka imperialisme inilah NU penting melihat neoliberalisme pada hari ini dan di masa-masa mendatang.

Standing Position yang Perlu Dimainkan

Karena neoliberalisme bekerja tidak dengan semata todongan senjata, tetapi dengan mekanisme ekspansi modal, keuangan, dan penguasaan asing oleh perusahaan transnasional atas bidang-bidang hajat hidup orang banyak, langkah-langkah merespon neoliberalisme perlu memperhatikan tiga tingkatan dalam kerja neoliberalisme: level dunia internasional, level nasional negara, dan level basis riil di masyarakat. Ketiga hierarki ini perlu direspon oleh NU, dengan tidak boleh melepaskan satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Kalau NU hanya bergerak dalam konteks basis riil masyarakat dan mencoba membentenginya di wilayah itu, tetapi membiarkan kerja neoliberalisme di level nasional dan internasional terus berjalan, standing position yang dimainkan hanyalah bertahan: ibarat kelas bulu melawan kelas berat.

⁴⁸ William K Tabb, *Tabir Politik Globalisasi ...*, hlm. 109.

- Di tingkat global, neoliberalisme selama ini digerakkan oleh kekuatan negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan transnasional yang memanfaatkan badan-badan seperti IMF, WTO dan Bank Dunia, yang dalam tingkat internasional kekuatan internasional masih mempercayai adanya satu kekuatan superpower dan sekutu-sekutu dekatnya. Akan tetapi poros kekuatan lain mulai muncul seperti China, dan Amerika Latin yang mulai menawarkan alternatif-alternatif jenis lain.⁴⁹ Konsekuensi tatanan di tingkat global ini memerlukan upaya-upaya untuk mengubah pola dunia yang satu superpower menuju multisuperpower, sehingga gerak dan pola perkembangan dunia tidak hanya ditentukan oleh negara-negara maju dalam bimbingan satu superpower. Yang akan bisa membuat peta dunia berubah adalah bisa munculnya banyak superpower. Ketika banyak superpower ini muncul, maka akan banyak pilihan-pilihan untuk melakukan negosiasi. Di tingkat basis dan grassroots dunia, berkembangnya gerakan anti globalisasi⁵⁰ yang menambah adanya kekuatan-kekuatan lain yang menggerogoti dominasi dan hegemoni neoliberalisme yang digerakkan oleh satu negara superpower, juga bagian dari gerakan yang perlu mendapat perhatian oleh kalangan Nahdliyin. Langkah-langkah taktis dan program riil dari masyarakat NU untuk level internasional, perlu diarahkan dalam kerangka mengubah pola pemusatan satu superpower selama ini ke arah multisuperpower, serta harus mendapat keuntungan riil dari upaya-upaya ini bagi masyarakat bawah.
- Di tingkat nasional, merespon neoliberalisme sama dengan bagaimana membicarakan ideologi NU ikut menentukan kebijakan bangsa, dan apa yang dikemukakannya dapat didengarkan secara berwibawa oleh kekuasaan dan pemerintah. Neoliberalisme dalam kerangka negara nasional perlu dipahami menjerat negara nasional Indonesia dalam bentuk Hutang Luar Negeri (HLN) yang sangat besar dan benar-benar menyandera; dan beroperasinya perusahaan-

49 Beberapa fenomena jenis dunia lain yang sedang diperjuangkan salah satunya bisa dilihat dalam Coen Husen Pontoh (ed.), Gerakan Massa Menghadang Imperialisme Global (Yogyakarta: Resist Book, 2005).

50 Beberapa contoh tentang gerakan antiglobalisasi dapat disebutkan: (1) lebih dari 30.000 gerakan antiglobalisasi dari segala penjuru dunia dan berbagai kelompok basis (lingkungan, gender, buruh, dll.) turun ke jalan dan memblokir jalan-jalan dalam pertemuan di Seattle, Negara bagian AS yang saat itu menyelenggarakan KTM (Konferensi Tingkat Menteri) WTO tanggal 3 November-3 Desember 1999. Hasilnya WTO gagal mengambil keputusan dan pertemuan itu gagal; (2) beberapa Negara dunia ketiga (diantaranya Kenya dan Negara-negara di kepulauan Karibia) keluar dari pertemuan KTM WTO di Cancun Meksiko karena tidak puas dengan negara-negara maju. Bersamaan dengan itu, 35.000 petani di Negara bagian Karnataka India turun ke jalan memprotes WTO dan KTM WTO di Cancun agar mengeluarkan pertanian dari agenda WTO; (3) seorang petani Korea Selatan, Lee Kyung Hae membakar diri memprotes WTO dan pertemuan KTM di Cancun Mexico, hingga delegasi-delegasi di KTM Cancun menyempatkan diri melakukan hening ipta untuk sang petani. Di Jepang misalnya, para petani dan warga desa yang biasanya fanatik dengan LDP (Partai Demokrat Liberat), menurut professor Nobuhiro Suzuki, ahli ekonomi Universitas Tokyo: "Kini petani mengatakan tidak pada kebijakan PM Abe (dari LDP), karena Abe berpihak kepada pebisnis, mengabaikan suara petani, dan hanya mau mendengarkan para pemimpin bisnis." Pada Pemilu 27 Juli 2007, LDP kalah telak dari partai Demokrat Jepang, karena democrat menjanjikan perbaikan petani (Kompas, 6 Agustus 2007); dan masih banyak lagi protes-protes di tingkat lokal dari berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda.

perusahaan transnasional dan perusahaan besar di banyak bidang kehidupan masyarakat sehingga munculnya penguasaan asing dalam hajat hidup orang banyak. Di level nasional ini, NU perlu memperjuangkan bukan hanya soal parsial seperti menyeminarkan good governance, partisipasi masyarakat sipil, mendiskusikan korupsi, dan sejenisnya.⁵¹ Sebaliknya NU perlu memperjuangkan hal-hal mendasar yang menjadikan negeri ini tersandera: HLN Indonesia sudah jauh melampaui kekuatan APBN dan akan terus berlangsung sampai kapan tidak pernah jelas, perlu direspon untuk mencari solusi-solusi yang lebih kritis; NU perlu mempersoalkan penguasaan asing dalam perekonomian Indonesia, dan banyak yang lain. Dengan sendirinya, NU perlu memperjuangkan “ada dunia lain” selain apa yang disebut neoliberal, dan Amerika Latin bisa dijadikan contoh untuk kerangka “perjuangan dunia lain” itu di level nasional, meskipun secara substantif perlu dikaji serius. Dalam kerangka negara nasional, tujuan NU harus jelas, bangsa Indonesia perlu memperjuangkan negara nasional yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain dan melindungi warganya dari invasi keuangan global lewat kerangka neoliberalisme.

- Di tingkat basis, neoliberalisme akan menenggelamkan secara hebat kaum tani NU, nelayan kecil dan kelompok marjinal lain yang merupakan basis riil massa NU. Skema ke arah itu sangat jelas, neoliberalisme akan segera menghadirkan penguasa-penguasa besar, baik asing atau dalam negeri dalam ranah dan bidang yang selama ini menjadi basis ekonomi masyarakat basis NU. Akses masyarakat bawah ini atas tanah, laut, dan hutan Indonesia yang dimiliki nenek moyang mereka, akan semakin sulit dengan hadirnya produk-produk dan penguasaan oleh perusahaan besar asing dan dalam negeri yang menyentuh sampai ke bawah. Di level bawah, secara praksis NU perlu membuat eksperimen-eksperimen ekonomi kemandirian baik dalam bentuk koperasi atau sejenisnya, dan memperjuangkan regulasi yang berpihak ke masyarakat, terutama dalam soal tatanan agraria dan bidang yang menjadi hajat hidup orang banyak. Lolosnya UU Permodalan dengan tanpa kewajiban corporate social responsibility (CSR), UU Sumberdaya Air dan sejenisnya tanpa kehadiran perjuangan gigih NU untuk berpihak ke bawah dalam UU itu, jelas sebuah keteledoran besar.

Melihat tiga hierarki perlunya respon yang dilakukan NU atas tatanan dan kepentingan neoliberalisme, penulis sangat pesimis untuk menatap masyarakat NU ke depan, meskipun tidak berarti harapan tidak ada sama sekali. Harapan akan

51 Beberapa kritik tentang skema kritis NGO di jalur neoliberal ini bisa dilihat dalam, James Petras dan Henry Veltmeyer. *Imperialisme abad 21* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), dalam “Ornop: Pelayan Neoliberal”.

selalu ada, manakala NU bisa memanfaatkan modal sosialnya untuk mengarahkan perjuangan NU ke depan kritis-progresif, dan di sisi lain bisa mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini sangat krusial dan bersifat laten. Sebaliknya pesimis selalu menghantui, manakala persoalan-persoalan penting selalu berakhir dalam skema diskusi, tausiyah, bahsul masail, dan perebutan jabatan-jabatan di struktur NU sudah mulai menyentuh ke persoalan money politics. Imperialisme neoliberal tidak bisa hanya direspon dengan tausiyah dan bahsul masail, sekadar penjelasan-penjelasan, dan dipandu oleh mereka yang hanya numpang nama dan menjadikan NU sebagai status sosial dan mengakumulasi modal inividu semata.

Di usianya yang hampir seabad, harusnya NU semakin dewasa untuk bisa melakukan desain-desain kreatif atas nama generasi mendatang untuk 10, 20 dan 50 tahun ke depan. Kalau respon NU selalu dan hanya mengulang gaya reaktif dan pasif seperti selama ini, penulis mengatakan kepada generasi-generasi NU mendatang: “Menjadi NU sama dengan menjadi kalah, miskin dan kumuh.” Nasib Syarikat Islam yang dulu besar tetapi kemudian menjadi berantakan perlu direfleksikan oleh masyarakat NU. Sementara jelas, selain invasi neoliberal ini, di masyarakat NU juga menghadapi invasi kalangan Islam seperti PKS, HTI, dan sejenisnya yang sudah semakin hebat ke jantung-jantung Nahdliyin. Apakah ini tidak cukup menyadarkan elit-elit masyarakat NU? *Wallahu a'lam*.